

RENCANA AKSI

INSPEKTORAT

TAHUN 2026

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
Visi : Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat						
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan				
1.1	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal				
1.1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut pemeriksaan Internal				
1.1.1.1	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
1.1.1.1.1	PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				
	a. Melaksanakan pengawasan/pemeriksaan keuangan berupa audit, monev, pengawasan kepada entitas (obrik) tentang Audit Honorarium, Audit perjalanan Dinas, Audit hibah, Bansos dan BK, Audit Kepatuhan lainnya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	3	3	3	3
1.1.1.1.2	PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				
	a. Melaksanakan pengawasan/pemeriksaan kinerja berupa audit, monev, pengawasan kepada entitas (obrik) tentang AUDIT KINERJA, AUDIT KETAATAN, PROBITY AUDIT, AUDIT TIK SPBE, MONEV ASN, MONEV SAKIP, MONEV MR, SPIP, INFLASI, P3DN, PERIJINAN, PELAYANAN PUBLIK, PPRG	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	12	12	12	10

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.1.1.1.3	REVIU LAPORAN KINERJA	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				
	a. Melaksanakan pemeriksaan/reviu kinerja berupa reviu, evaluasi kepada entitas (obrik) tentang REVIU (RPJMD, RENSTRA, RKPD, KUA PPAS, RKA-DPA, APBD – P APBD, PBJ, SPM, LKPJ, LPPD, LKJiP, ASB, SSH,HSPK)	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	3	4	4	4
1.1.1.1.4	REVIU LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				
	a. Melaksanakan pemeriksaan/reviu keuangan berupa reviu, evaluasi kepada entitas (obrik) tentang REVIU (DAK,DAU, BOS, LKPD, DANA KAPITASI, HIBAH, BANSOS, BANTUAN KEUANGAN, PENYERAPAN ANGGARAN, PEMBAYARAN GAJI P3K, REVIU TATA KELOLA PAD, BMD)	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	10	20	20	20
1.1.1.1.5	PENGAWASAN DESA	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				
	a. Melaksanakan pengawasan/pemeriksaan desa dan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota berupa audit, monev, pengawasan kepada entitas (obrik) tentang Audit Dana dan aset Desa, Monev Dana dan aset Desa, siswaskeudes.	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	3	3	3	3
1.1.1.1.6	KERJA SAMA PENGAWASAN INTERNAL	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				
	a. Melaksanakan Kerjasama / joint audit dengan pihak BPKP, Inspektorat Prov, Irjen Kemendagri, dan Pihak ketiga (jasa konsultan)	Jumlah Dokumen kerjasama / MOU	0	1	1	0
1.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut pemeriksaan Eksternal				
1.1.2.1	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Eksternal				
1.1.2.1.1	MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				

No.	Uraian		Indikator	Target			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
		a. Melaksanakan pemantauan / pengawasan terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, (TL Rekomendasi eksternal yaitu BPKP, KPK, Irjen Kemendagri, Inspektorat Provinsi dan APH) dan TL rekomendasi APIP,	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan/pengawasan Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan	2	2	2	2
1.1.3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan				
1.1.3.1	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU		Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dan aduan masyarakat				
1.1.3.1.1	PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				
		a. Melaksanakan pengawasan/pemeriksaan untuk penanganan penyelesaian kerugian daerah berupa audit, pengawasan kepada entitas (obrik) tentang AUDIT PKKN, TGR DALAM RANGKA PENYELAMATAN KEUANGAN DAERAH DAN ASSET.	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	3	3	3	3
1.1.3.1.2	PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				
		a. Melaksanakan pengawasan/pemeriksaan dengan tujuan tertentu berupa audit, pengawasan kepada entitas (obrik) tentang AUDIT INVESTIGATIF/ PEMERIKSAAN KHUSUS / KASUS, PEMERIKSAAN PENGADUAN MASYARAKAT, KERJASAMA / EKSPPOSE APIP APH.	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	3	3	3	3
1.2	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah		Rata-rata kategori hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah				
1.2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase nilai evaluasi Internal AKIP OPD minimal A				

No.	Uraian		Indikator	Target			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1.2.1.1	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL		Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
1.2.1.1.1	PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				
	a. Melaksanakan pengawasan/pemeriksaan kinerja berupa audit, monev, pengawasan kepada entitas (obrik) tentang Monitoing dan Evaluasi SAKIP OPD dan Kabupaten		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	12	12	12	10
1.3	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas (PM) Sistem Pengendali Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi		Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).				
1.3.1	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi				
1.3.1.1	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Jumlah Jenis Laporan Pendampingan dan Asistensi				
1.3.1.1.1	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				
	a. Melaksanakan kegiatan pendampingan dan asistensi (Jasa Konsultansi) kepada Perangkat Daerah tentang urusan pemerintahan daerah berupa Sosialisasi dan Kegiatan MR, SPIP, SPBE, Koordinasi APIP dengan APH dalam penanganan laporan /dumas terindikasi tipikor, pendampingan PSD, dan asistensi P3DN, RAKORWASDA.		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	12	10
1.3.1.1.2	PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				

No.	Uraian		Indikator	Target			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
		a. Melaksanakan kegiatan Pendampingan, Asistensi (Jasa Konsultansi), Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi kepada Perangkat Daerah berupa Pendampingan, Sosialisasi dan Evaluasi Penilaian Internal Reformasi Birokrasi, AKIP	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	12	12	12	10
1.3.1.1.3	KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				
		a. Melaksanakan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi (Jasa Konsultansi) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi kepada Perangkat Daerah/entitas berupa Sosialisasi dan Pelaksanaan MCP Korsupgah, SPI KPK, LHKPN, LKASN, UPG Gratifikasi, PAKSI, Desa Anti Korupsi dan Saber Pungli, HAKORDIA	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1	2	2	1
1.3.1.1.4	PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				
		a. Melaksanakan kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi (Jasa Konsultansi) Penegakan Integritas kepada Perangkat Daerah berupa sosialisasi dan pelaksanaan tentang Pembangunan ZI WBK / WBBM, Penanganan Whistler Blowing System (WBS), Monev benturan kepentingan, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Zona Integritas (ZI) Desa.	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	12	12	12	10
1.4	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas (PM) Sistem Pengendali Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi		Nilai Kapabilitas APIP				
1.4.1	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)				
1.4.1.1	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Jumlah Jenis Laporan Pendampingan dan Asistensi				
1.4.1.1.1	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
	a. Melaksanakan kegiatan pendampingan dan asistensi (Jasa Konsultansi) kepada Perangkat Daerah tentang urusan pemerintahan daerah berupa Sosialisasi dan Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP.	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	12	10
1.4.1.2	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	Jumlah Jenis Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di bidang pengawasan				
1.4.1.2.1	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				
	a. Melaksanakan penyusunan dan perumusan SOP/Peraturan/Regulasi/Kebijakan/ PIAGAM CHARTER AUDIT (IAC) tentang teknis pengawasan/pemeriksaan, Pendampingan dan Asistensi (Jasa Konsultansi).	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	2	1	1
1.4.2		Persentase Ketercapaian Indikator Program				
1.4.2.1		Jumlah Jenis Laporan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				
1.4.2.1.1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	a. Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Dokumen Renja, renstra, PKPT, PPBR,RKA, DPA dan Perubahannya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	0
1.4.2.1.2		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
	a. Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD berupa Dokumen penyusunan ikhtisar pengawasan, laporan Monev renja triwulanan, laporan monev renaksi SIAKRI.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	1	1	0
1.4.2.1.3		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	a. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa Dokumen evaluasi kinerja (LPPD, LKJiP, Laporan hasil evaluasi intern)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	0	0
1.4.2.2		Jumlah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1.4.2.2.1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
	a. Melaksanakan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa Pembayaran Gaji dan TTP ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62	62	62	62
1.4.2.2.2		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
	a. Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	1	0	1
1.4.2.2.3		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
	a. Melaksanakan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	1	0

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.4.2.3		Jumlah Jenis Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1.4.2.3.1		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				
	a. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	10	10	14
1.4.2.4		Jumlah Jenis Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.4.2.4.1		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
	a. Melaksanakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	14
1.4.2.4.2		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				
1.4.2.4.3		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				
	a. Melaksanakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	2	2	1
1.4.2.4.4		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				
	a. Melaksanakan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	3	3	2
1.4.2.4.5		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				
	a. Melaksanakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	2	2	1

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.4.2.4.6		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	a. Melaksanakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	45	35	45
1.4.2.4.7		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
	a. Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	1	0
1.4.2.5		Jumlah Jenis Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.4.2.5.1		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				
1.4.2.5.2		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				
1.4.2.5.3		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				
	a. Melaksanakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	12	12	14
1.4.2.6		Jumlah Jenis Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.4.2.6.1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	a. Melaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	0	1	0
1.4.2.6.2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
1.4.2.6.3		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
	a. Melaksanakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	6	6	6
1.4.2.7		Jumlah Jenis Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.4.2.7.1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
	a. Melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	1	1	0
1.4.2.7.2		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
	a. Melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4	4	4
1.4.2.7.3		Jumlah Mebel yang Dipelihara				
1.4.2.7.4		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				
	a. Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	12	12	14
1.4.2.7.5		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
	a. Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	1	0

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
			Gresik, Januari 2026 INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK <u>Dr. ACHMAD HADI, SP.,MT., CGCAE., CFrA.</u> Pembina Utama Muda NIP. 19740101 199803 1 013			

No.	Uraian	Indikator	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
			Gresik, 6 Januari 2026 INSPEKTOR KABUPATEN GRESIK  <u>Dr. ACHMAD HADI, SP., MT., CGCAE., CFrA.</u> Pemula Utama Muda NIP. 19740101 199803 1 013			